

## GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS

Tgl/Bln/Thn : 8/ Juni / 2010

Subyek : Lumpur Lapindo

Hari : Selasa

Kata Kunci :

Halaman : 14

### LUMPUR LAPINDO : PENUTUPAN SEMBURAN TIDAK DIUSULKAN

Jakarta, Kompas - Dalam rapat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2011 dengan Komisi V DPR, Senin (7/6), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengajukan anggaran penanganan semburan lumpur sepanjang 2011 sebesar Rp 1,286 triliun.

Pengajuan anggaran ini menuai kritik sebab Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) justru tidak mengusulkan anggaran penghentian semburan lumpur dari areal konsensi PT Lapindo Brantas itu.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Mulyadi itu, Kepala BPLS Sunarso menjelaskan, kebutuhan anggaran penanggulangan semburan lumpur pada 2011 mencapai Rp 1,286 triliun. Nilai anggaran BPLS itu lebih besar dari nilai anggaran yang diajukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menangani 183 kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia pada 2011, yaitu Rp 1,184 triliun.

Anggaran Rp 1,286 triliun itu sebagian besar akan tersedot untuk biaya pengaliran 32 juta meter kubik lumpur ke Sungai Porong (Rp 155 miliar), bantuan program kontingensi bagi warga di luar peta area terdampak (Rp 413 miliar), pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur (Rp 330 miliar), dan relokasi infrastruktur (Rp 235 miliar).

Anggota Komisi V dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II, Hanna Gayatri, mengkritik anggaran BPLS yang dari tahun ke tahun semakin besar.

"Dan, kita tidak tahu sampai kapan lumpur akan menyembur. Sudah saatnya BPLS memikirkan dan mengajukan anggaran untuk menangani sumber masalah semburan. Mungkin biaya penghentian semburan 10.000 dollar AS per hari dan pekerjaan itu tidak bisa selesai dalam waktu tiga bulan. Akan tetapi, (secara jangka panjang) itu akan menghemat biaya," kata Hanna.

Menanggapi pertanyaan Hanna, Sunarso menjelaskan, sejak semburan terjadi pada 29 Mei 2006, telah dilakukan sejumlah upaya penghentian semburan lumpur. Semua upaya itu gagal.

"Sebagian ahli berpendapat, semburan lumpur bisa ditutup, sebagaimana yang terjadi di Teluk Meksiko. Namun, sebagian ahli lainnya menyatakan semburan itu tidak bisa ditutup. Sementara ini, penanganan BPLS menggunakan asumsi bahwa semburan tidak bisa ditutup. Kami meningkatkan pola penanganan semburan. Yang pertama dengan membuat waduk. Kedua dengan membuang lumpur ke Sungai Porong," kata Sunarso.

Deputi Bidang Operasi BPLS Mochamad Soffian Hadi menjelaskan, secara umum ada tiga penyebab semburan lumpur, yaitu panas bumi, mud vulcano, dan underground blowout minyak bumi atau gas. Ia menyatakan, hanya semburan lumpur yang disebabkan underground blowout yang punya peluang besar untuk dihentikan.

"Jika semburannya disebabkan underground blowout, dan hanya 19.000 barrel per hari seperti volume semburan minyak di Teluk Meksiko, mungkin bisa dihentikan. Volume semburan lumpur di Sidoarjo mencapai 1 juta barrel per hari. Dan, berat jenis lumpur itu dua kali berat jenis minyak bumi. Pertanyaannya, pernahkah ada kasus semburan fluida dengan volume seperti itu yang bisa dihentikan," kata Soffian. (ROW)